

PERBANDINGAN LOYALITAS PEMILIH ABANGAN DAN SANTRI TERHADAP KHOFIFAH DAN SAIFULLAH YUSUF PADA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018

Novy Setia Yunas

Departemen Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: novysetiayunas@gmail.com

Baiqun Isbahi

FISIPOL Universitas Darul 'Ulum Jombang

E-mail: baiqunbai@gmail.com

Abstract

This paper will review the comparison of loyalty of Abangan and Santri voters to two contestants in East Java Pilgub 2018. The reason, East Java Pilgub 2018 was followed by two contestants who both came from Nahdlatul Ulama. But on the other hand, political contestation in East Java cannot be separated from the cultural political dynamics scattered in the four corners of Mataraman, Tapal Kuda, Arek and Madura. These four regions certainly have the characteristics and loyalty of different voters both politically and sociologically. The political map certainly cannot be separated from Clifford Geertz classical study of the typology of the "aliran" politics (politik aliran) in Java. The method used in this paper is Library Research. The main information in this study was obtained through the analysis of the publication of the results of Kompas R&D survey in February and May 2018. The result of comparison analysis of loyalty of voters will not only know the extent of loyalty support of cultural groups on both candidates but see the tendency of reorientation of voting behavior in each cultural

group from the influence of cadence and culture shifted to the orientation of the issues brought by the candidate.

Key Words: *Loyalty, Voters, Voting Behavior, Culture, Political Cleavages*

A. PENDAHULUAN

Setelah tumbanganya rezim Suharto pada tahun 1998, pemerintah Indonesia melakukan sejumlah reformasi dan proses demokratisasi yang cukup signifikan khususnya di bidang tata kelola pemerintahan untuk mencegah akumulasi kekuasaan di tangan sejumlah elite di tataran Nasional (Marijan 2010, 19). Secara khusus, ada dua kebijakan sentral di masa reformasi tersebut yakni kebijakan desentralisasi dan pengaturan baru pada sistem kepartaian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan memperkuat peran masyarakat sipil di berbagai aspek kehidupan politik, berbangsa dan bernegara. Kebijakan desentralisasi menekankan pada pengalihan atau transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, terutama di tingkat Provinsi sampai Kabupaten/ Kota, termasuk mekanisme seleksi untuk pemimpin daerah. Selama rezim Orde Baru berkuasa, struktur kelembagaan pemerintah Indonesia sangat sentralistik. Pengaturan kelembagaan dan kekuasaan politik yang diserahkan kepada parlemen di daerah secara efektif mencegah munculnya tokoh terkemuka atau tokoh yang memiliki kapabilitas di daerah. Pendekatan Orde Baru terkait pemilihan kepala daerah terlihat secara jelas, berdasarkan Pasal 15 Angka 2 UU No. 5/1974 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki hak mengajukan calon gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk calon Bupati/ Walikota, DPRD dapat mengirimkan calon mereka ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur (Pasal 16 Angka 2). Ini berarti bahwa calon lokal memiliki kesempatan untuk tampil sebagai pemimpin daerah yang disalurkan melalui DPRD. Namun, tersirat bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengesampingkan aspirasi lokal. Dalam pengaturan kelembagaan ini, oligarki di tingkat lokal kurang mungkin terjadi (Sidel 2004, 61). Selain itu, partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal (dan nasional) pada dasarnya dihambat dan semua keputusan strategis dibuat di tingkat pusat (Mietzner 2010, 173). Hal ini menghancurkan sistem politik di Indonesia (Antlov 2003, 74). Selain itu, keberadaan

Golkar sangat menghegemoni sehingga mencegah oligark lokal dari negara berkembang karena calon harus mendapatkan dukungan dari rezim yang berkuasa agar dicalonkan dan kemudian dipilih (Mietzner 2010, 175).

Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, tuntutan untuk transfer wewenang ke daerah jelas terdengar. Pemerintahan Habibie menanggapi dengan mengeluarkan Undang Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Undang-undang baru tersebut secara tersirat memiliki dua tujuan utama. Pertama, mereka mewakili komitmen yang kuat untuk mereformasi mekanisme pemerintahan di Indonesia (Rasyid and Sakka 2003, 63). Harapan utama adalah bahwa dengan pengalihan wewenang ke tingkat lokal, pemerintah daerah akan lebih sensitif terhadap aspirasi penduduk setempat dan akibatnya pemerintah daerah mampu menciptakan kebijakan publik yang lebih efektif berdasarkan kebutuhan lokal. Kedua, dimaksudkan untuk menangkal gerakan separatis di daerah- sumber daya akan dipindahkan ke tingkat kabupaten dan sentimen etno-regional lokal akan sebaliknya dialihkan terhadap isu-isu ekonomi (Aspinall et al. 2010, 4; Buehler 2010, 268). Akibatnya, undang-undang desentralisasi yang baru menjadi dorongan untuk proyek desentralisasi di Indonesia.

Kemudian pada tahun 2004, pemerintah memperkenalkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan legitimasi pemimpin di tingkat lokal. Implikasi yang paling signifikan dari kebijakan ini terletak pada penyediaan lebih banyak ruang untuk politisi lokal dalam bersaing pada kontestasi kepemimpinan lokal. Dengan demikian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau kepala daerah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, sebagaimana esensi dari demokrasi yakni kedaulatan di tangan rakyat. Pilkada secara langsung diyakini sebagai jalan demokratis yang juga merupakan wujud nyata azas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat (Ramses, 2003: 25).

Tiga tahun terakhir ini, Pilkada dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pilkada serentak tahap pertama

telah dilaksanakan di 8 Provinsi, 170 Kabupaten dan 26 Kota di Indonesia pada 9 Desember 2015. Berikutnya, Pilkada serentak tahap kedua di 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten juga telah terlaksana pada 15 Februari 2017. Pada tahun 2018, Pilkada masih akan dilaksanakan lagi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 17 Provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di 115 Kabupaten, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 39 Kota. KPU menyelenggarakan pada hari pada Hari Rabu, 27 Juni 2018 (KPU, 2017). Semakin banyak Pilkada yang terlaksana harusnya semakin menunjukkan kedewasaan berdemokrasi warga negara Indonesia.

Salah satu provinsi di Indonesia yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang sangat strategis dalam berbagai bidang di Indonesia. Mulai dari bidang ekonomi, dimana angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sangat tinggi melampaui target pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Provinsi Jawa Timur pun menjadi salah satu provinsi dengan luasan geografis yang cukup besar dengan jumlah penduduk yang besar pula menjadikan Jawa Timur menjadi salah satu kunci dalam setiap kontestasi politik di tingkat Nasional. Tidak hanya itu, sebagai provinsi yang cukup heterogen, hal tersebut menjadi salah satu peluang dalam setiap gelaran politik yang ada. Secara umum, persebaran kultural masyarakat Jawa Timur terbagi menjadi empat wilayah: Mataraman, Jawa Arek, Tapal Kuda dan Madura. Ini memang bukan kategorisasi kultural yang ketat. Biasanya kategori ini hanya digunakan untuk mempermudah melihat sebaran demografi politik aliran di Jawa Timur. Persebaran kultural tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari studi klasik Clifford Geertz dalam *The Religion of Java* (Geertz 1960) soal tipologi politik aliran di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur.

Beranjak pada kondisi tersebut, maka Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang masih menyisakan peta politik aliran sejak 1950-an. Setiap kali Pemilihan Kepala Daerah, pasangan kepala daerah dari golongan *abangan* dan santri dianggap ideal dan mewakili konfigurasi yang ada di Jawa Timur. Demografi politik Jawa Timur rupanya tidak jauh beranjak dari pola 1955 saat berlangsungnya pemilihan umum pertama. Di sini, polarisasi *abangan* dan santri pada ranah politik masih begitu terasa. Namun

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 yang diikuti oleh dua pasang calon yakni Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, serta Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno, kedua calon gubernur dengan representasi yang sama Nahdlatul Ulama (NU). Khofifah berlatar belakang santri Nahdliyin seperti Gus Ipul. Mereka berdua memperebutkan suara di basis masa yang sama. Tetapi untuk calon Wakil Gubernur Emil Dardak yang merupakan Bupati Trenggalek dinilai sebagai representasi dari wilayah Mataraman dengan corak politik kaum *Abangan* cukup kental. Begitupula calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno yang memiliki trah dari Sukarno sebagai salah satu tokoh nasional yang memiliki pendukung dan basis massa di Jawa Timur, khususnya kaum *Abangan*.

Hal ini tentunya cukup menarik untuk dikaji, sejauh mana sejauh mana loyalitas dukungan kelompok kultural baik kaum santri maupun kaum *abangan* pada kedua calon. Selain itu, menarik juga untuk melihat apakah ada kecenderungan reorientasi *voting behaviour* pada setiap kelompok kultural dari pengaruh ketokohan maupun budaya bergeser ke orientasi isu yang dibawa oleh calon pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018 ini.

B. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan informasi dari publikasi ilmiah, penelitian terdahulu, ataupun sumber tertulis lain yang mendukung. Sumber informasi utama dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis publikasi hasil penelitian sebelumnya dan dokumen lain yang terkait dengan tujuan kajian, dalam hal ini informasi utama diperoleh melalui analisis publikasi hasil survey Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada bulan Februari dan Mei tahun 2018. Dalam penelitian ini, proses analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Analisis dan interpretasi atau penafsiran ini dilakukan dengan merujuk kepada landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konfigurasi Peta Politik Jawa Timur

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikatakan paripurna mulai dari aspek historis hingga kultural, sehingga provinsi ini menjadi kunci dalam setiap kontestasi politik di tingkat nasional. Selain itu, Jawa Timur merupakan provinsi terluas di antara enam provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah penduduknya terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Provinsi di ujung timur Pulau Jawa itu juga memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, yakni 29 kabupaten, 9 kotamadya, 657 kecamatan, 784 kelurahan dan 8.484 desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2015 jumlah penduduk provinsi tersebut sebanyak 38.847.561 jiwa, terdiri atas 19.172.610 jiwa penduduk laki-laki dan 19.674.951 jiwa penduduk perempuan dengan tingkat kepadatan penduduknya 774 jiwa/km².

Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah suku Jawa dan secara etnisitas cenderung heterogen. Secara umum, persebaran kultural masyarakat Jawa Timur terbagi menjadi empat wilayah: Mataraman, Jawa Arek, Tapal Kuda dan Madura. Ini memang bukan kategorisasi kultural yang ketat. Biasanya kategori ini hanya digunakan untuk mempermudah melihat sebaran demografi politik aliran di Jawa Timur. Persebaran kultural tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari studi klasik Clifford Geertz dalam *The Religion of Java* (1960) soal tipologi politik aliran di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur.

Wilayah Mataraman merupakan bekas daerah *vorstenlanden* (kekuasaan Kerajaan Mataram) yang membentang di sisi timur Ngawi, Kediri, Madiun, Nganjuk, Magetan, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Blitar hingga Tuban. Dalam sejarah, karena statusnya sebagai *vorstenlanden*, Mataraman sebenarnya lebih dekat dengan budaya “Jawa Tengahan”. Karakteristik budaya Jawa Mataraman sangat kental dengan spirit nasionalisme, yang terkadang identik dengan sosok Sukarno yang mendirikan partai dengan spirit nasionalisme. Dan, tentu saja, kultur *abangan* yang menonjol. Kecenderungan yang agak “hijau” paling tidak terdapat pada bagian pesisir (Tuban dan Lamongan) serta Kediri, tempat di mana pesantren-pesantren tradisional besar berada. Tapi dalam hal arah politik, daerah ini didominasi

suara kaum *abangan*. Pada Pemilu 1955, Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia (dua partai representasi priayi-*abangan*) jauh mengungguli lawan-lawannya di Karesidenan Madiun dan Kediri. Kecenderungan itu terus berlanjut pada Pemilu 2014 ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenangi suara terbanyak di daerah itu. Pada pemilihan gubernur 2013 lalu, pasangan Soekarwo dan Gus Ipul menang telak di Mataraman. Hanya di Tuban dan Lamongan pasangan lawannya, Khofifah-Herman, unggul. Jika Soekarwo dianggap sebagai wakil kaum *abangan*, maka politik aliran yang eksis sejak 1950-an relative masih berlaku hingga zaman ini di wilayah ini.

Selanjutnya, wilayah Arek yang merupakan wilayah dengan kultur yang paling urban, kawasan metropolitan Surabaya dan Malang Raya menjadi simbol utama kosmopolitanisme Jawa Timur. Namun ada beberapa daerah yang mendekati subkultur Arek dengan ciri khasnya tersendiri. Subkultur tersebut banyak dijumpai di daerah-daerah yang menjadi penyangga kawasan Surabaya, yaitu Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Gresik. Secara politik, wilayah ini, tidak ada partai politik dan aliran yang benar-benar dominan. Merujuk pada data yang ada, gabungan perolehan suara PNI dan PKI di Karesidenan Surabaya pada Pemilu 1955 (495.000) menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dengan Partai NU (431.000). Kecenderungan ini terus berlanjut hingga 2014: PKB dan PDIP masing-masing memperoleh suara yang cukup berimbang. Sementara data perolehan suara Pilgub 2013 menunjukkan kemenangan Soekarwo-Gus Ipul di mayoritas kabupaten/kota di wilayah ini.

Wilayah ketiga, sementara itu, adalah basis kaum santri yang sangat kuat. Secara tradisional, di sinilah Partai NU, dan kemudian PKB pada masa kini, mendulang suara begitu banyak. Dikenal dengan nama “Tapal Kuda”, kawasan yang membentang dari Probolinggo hingga Banyuwangi ini memiliki karakteristik masyarakat yang secara umum sangat religius dan memegang kuat budaya patron, sehingga membentuk model masyarakat yang sangat bersahaja. Karakteristik tersebut akhirnya membuat model wilayah ini sangat lekat dengan budaya pesantren, sedangkan afiliasi organisasi yang paling dominan adalah NU dengan memiliki massa yang menyatakan diri berafiliasi sebanyak 97%. Selain itu, masyarakat di wilayah ini sangat menghargai dan menghormati para tokoh agama (kia) dengan cara memuliakannya. Sehingga,

di daerah inilah adagium *pejah-gesang nderek para kiai* (hidup-mati ikut para kiai) menemukan gemanya yang paling keras. Dalam sejarahnya, suara gabungan partai NU dan Masyumi pada Pemilu 1955 jauh melampaui gabungan PKI dan PNI (850.000 berbanding 612.000). Pada 2014, dan pemilu-pemilu sebelumnya di era Reformasi, PKB selalu mendulang suara sangat signifikan dari wilayah ini. Pertarungan santri versus santri di wilayah ini ada pada level sejauh mana mereka bisa memikat kiai-kiai lokal dan para pimpinan pondok pesantren yang ada.

Kondisi kultural yang ada di wilayah Tapal Kuda, tentunya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan wilayah Madura. Di wilayah yang terdapat 4 Kabupaten ini; Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep tersebut basis kaum santri dan Nahdliyin sangat kuat. Kekuatan basis santri ini tentunya tidak terlepas dari ketokohan seorang kyai. Sehingga tidak mengherankan jika kekuatan di dua wilayah tersebut Madura dan Tapal Kuda disokong oleh kekuatan ketokohan seorang kyai. Posisi kiai dengan berbagai frasa, menjadi salah satu bentuk perubahan sosial, yang terkait dengan status sosial, dimana peranan kiai saat ini tidak lagi hanya berkutat pada urusan surgawi atau keagamaan tetapi juga urusan duniawi seperti politik (Abdurrahman, 2009). Selain itu, Entitas etnis Madura di Jawa Timur memiliki karakteristik yang unik yakni stereotipikal, dan stigmatik, sehingga orang Madura memiliki realitas sosial yang sangat kuat. Dengan sikap ketaatannya, sifat tunduk, serta pasrah secara hierarkis kepada empat figur utama dalam berkehidupan, terlebih lagi dalam praktik keberagamaan. Keempat figur itu adalah *Buppa, Babbu, Guru, dan Rato* (Ayah, Ibu, Guru, dan Pemimpin pemerintahan) (Taufiqurrahman 2007).

Penggambaran tentang wilayah budaya di Jawa Timur di atas, jika dikaitkan dengan peta politik terkait dengan besaran suara, hasilnya akan dapat terlihat, seperti gambar dibawah ini. Jumlah yang terekam dari data tersebut tampak persebaran proporsi suara sebagai berikut: wilayah Jawa Mataraman sebesar 40%, wilayah Arek sebesar 27%, wilayah Pandhalungan sebesar 24 %, wilayah Madura sebesar 9 % (Kompas.com, 21 Juli 2008).

2. Perbandingan Loyalitas Pemilih *Abangan* dan Santri dalam Pilgub Jatim 2018

Kultur politik masyarakat sebagaimana diungkapkan di atas,

memberikan identifikasi terhadap pola keberpihakan masyarakat yang ada di provinsi Jawa Timur. Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro (Zuhro 2009)(2014) mengatakan bahwa, kultur politik di Provinsi Jawa Timur diibaratkan seperti buah semangka dimana luarnya hijau dan dalamnya merah, itu merupakan simbol bahwa hijau identik dengan budaya religius yang dimaksud disini adalah Nahdlatul Ulama dan merah identik dengan organisasi nasionalis yang di maksud disini adalah PDIP (Kompas.com, 02 Mei 2014). Sehingga setiap kontestasi politik di Provinsi Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari faktor budaya dan jumlah massa fanatik yang ada.

Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018, terdapat dua koalisi partai yang koheren dengan budaya lokal dan dukungan massa yang besar. Di satu pihak, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak diusung oleh: Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Di pihak lain, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera. Kontestasi tersebut menarik untuk diamati mengingat, kedua kandidat Calon Gubernur merupakan mantan pengurus Gerakan Pemuda Anshor dan juga Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), dimana kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang berada dibawah naungan NU yang memiliki basis masa terbesar di Jawa Timur.

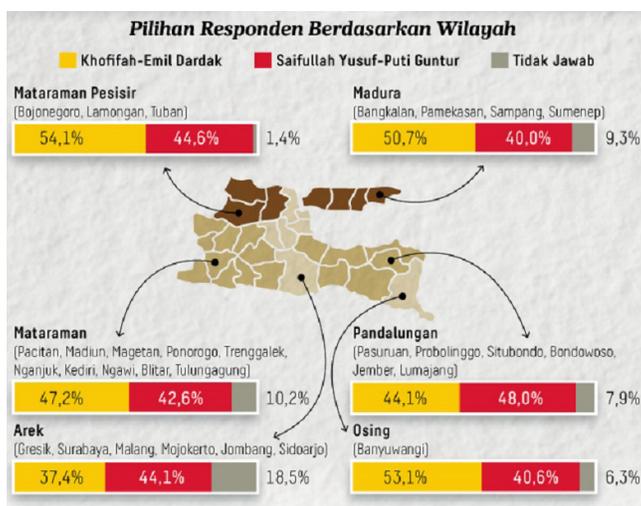
Pada koalisi PDIP dan PKB yang dulunya tidak mendukung Saifullah Yusuf sekarang merapat ke koalisi tersebut. Latar belakangnya merupakan salah satu mantan Ketua GP Anshor yang merupakan salah satu tokoh dikalangan NU. PDIP akhirnya mengusung Puti Guntur Soekarno sebagai pengganti dari Azwar Anas. Puti Guntur Soekarno yang memiliki trah dari Sukarno sebagai salah satu tokoh nasional yang memiliki pendukung dan basis massa di Jawa Timur. Hal ini menegaskan bahwa Koalisi PDIP dan PKB menginginkan perolehan suara mutlak dari para simpatisannya, sehingga Puti dianggap bisa mewakili keinginan para pendukung Soekarno. Koalisi yang dahulu mengusung Saifullah Yusuf dan Pakde Karwo beralih untuk mendukung Khofifah, seperti Partai Demokrat.

Sedangkan pada koalisi Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Golkar, PAN, dan Partai Gerindra. Khofifah merupakan salah satu pimpinan fatayat dan muslimat NU yang memiliki basis masa besar khususnya di Jawa Timur. Pasangannya Emil Dardak memiliki kelemahan bermasalah dengan partainya, yaitu PDIP.

Berangkat dari latar belakang afiliasi organisasi keagamaan yang sama dan partai pengusung yang berbeda, tentunya kedua pasangan calon ini memiliki loyalitas dukungan dari banyak kelompok terutama kelompok santri dan *abangan*. Dalam konteks Jawa Timur, pasangan kepala daerah *abangan* dan santri memang dianggap ideal. Demografi politik Jawa Timur rupanya tidak jauh beranjak dari pola 1955 saat berlangsungnya pemilihan umum pertama. Di sini, polarisasi *abangan* dan santri pada ranah politik masih begitu terasa.

Berdasarkan survey Pilgub Jatim yang dirilis oleh Litbang Kompas pada bulan Februari tahun 2018, dukungan dari berbagai wilayah Mataraman, Mataraman Pesisir, Madura dan Osing (Banyuwangi) mengerucut pada calon Gubernur Khofifah dan Emil Dardak. Sedangkan, calon Gubernur Saifullah Yusuf dan Puti Guntur memperoleh dukungan yang cukup besar dari wilayah Tapal Kuda dan Arek.

Gambar 1. Peta Persebaran Dukungan Calon Gubernur Jawa Timur pada Survey Litbang Kompas bulan Februari 2018



Sumber: Litbang Kompas

Kondisi ini memperlihatkan bahwa, loyalitas kaum Santri yang terletak di wilayah Madura dan Tapal Kuda cukup kuat terhadap Khofifah maupun Saifullah Yusuf. Loyalitas ini tentunya dibangun dari kedekatan afiliasi Nahdlatul Ulama yang tidak dapat dilepaskan pula dari pengaruh Kyai.

Namun berbeda kondisinya bagi daerah Mataraman yang dominan kaum *Abangan*, preferensi masyarakat di wilayah Mataraman ini nampaknya tidak sejalan dengan partai pengusung yang merepresentasikan spirit nasionalisme, atau yang terkadang identik dengan sosok Soekarno. Faktanya berdasarkan survey tersebut, wilayah Mataraman justru dikuasai oleh calon Gubernur Khofifah, bukan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan atau lebih lebih pasangan yang masih memiliki garis keturunan dengan Soekarno dalam hal ini Cawagub pendamping Saifullah Yusuf, Puti Guntur Soekarno.

Sedangkan hasil dari survei Litbang Kompas terbaru terkait Pilgub Jatim 2018 yang dirilis pada Bulan Mei tepatnya hari Kamis (31/5/2018). Litbang Kompas membandingkan hasil survei pada Mei 2018 dengan survei yang sudah mereka lakukan pada Februari 2018.

Elektabilitas pasangan Khofifah-Emil pada Mei 2018 sebesar 48,6% atau meningkat sekitar 4,1% dibanding survei sebelumnya. Sementara itu, elektabilitas Gus Ipul-Puti 45,6% atau naik 1,6% dari survei sebelumnya. Selisih elektabilitas dua pasangan ini juga meningkat dari 0,5% menjadi 3%. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 800 responden pada 10-15 Mei 2018. Responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan proporsional bertingkat. *Margin of error* +3,46% pada tingkat kepercayaan 95%.

Survei Litbang Kompas memperlihatkan ada peningkatan loyalitas pemilih pada kedua pasangan. Untuk pasangan Khofifah-Emil, ada 53,1% pemilih dalam survei Februari yang tidak akan mengubah pilihan. Hasil ini meningkat menjadi 65,4% di survei Mei. Sementara itu, ada 72,8% pemilih Gus Ipul-Puti yang mengaku tidak akan mengubah pilihan. Angka ini meningkat 16,2% dibanding survei sebelumnya.

Tidak hanya perubahan pada elektabilitas calon saja, melainkan pada survey Litbang Kompas pada bulan Mei ini juga terlihat ada pergeseran loyalitas pemilih di beberapa wilayah

kultural. Hampir seluruh wilayah Tapal Kuda/ Pandalungan, Mataraman dan Madura dikuasai oleh pasangan calon Gubernur Khofifah dan Emil Dardak, kecuali wilayah Arek yang dikuasai oleh pasangan calon Gubernur Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno. Hal ini memperlihatkan bahwa, terdapat pergeseran loyalitas pemilih di wilayah Tapal Kuda dimana pada survey Litbang Kompas bulan Februari dikuasai oleh Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno. Begitupula jika kita melihat pada Pilgub tahun 2008 dan 2013, wilayah ini menjadi basis suara partai- partai yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama kala itu mendukung Soekarwo dan Saifullah Yusuf. Hal lain yang menarik, pada kedua survey tersebut, terlihat sebuah kondisi anomali dimana wilayah Mataraman yang harusnya menjadi basis PDI-Perjuangan atau dekat dengan ideologi Nasionalisme maupun Marhenisme justru cukup loyal terhadap pasangan Calon Gubernur Khofifah dan Emil Dardak dibanding Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno yang diusung PDI-Perjuangan.

3. Reorientasi Voting Behaviour dalam Pilgub Jatim 2018

Perilaku pemilih (*voting behavior*) merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Sedangkan menurut Haryanto (Haryanto 2005), *Voting* merupakan kegiatan warga Negara yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya.

Perilaku memilih (*voting behavior*) menurut Jack C Plano (1971) adalah dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu (Plano,1971).

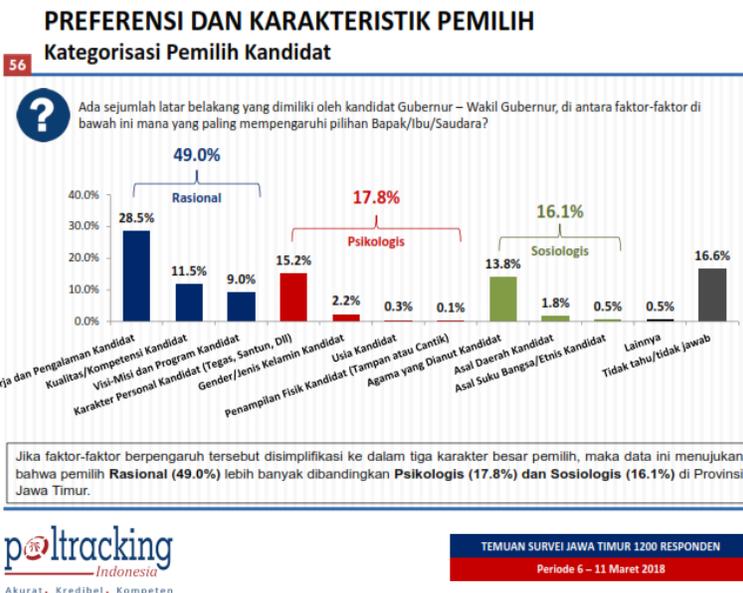
Budiarjo (2001) mendefinisikan *voting behavior* sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan

sosial dengan *direct action*nya dan sebagainya.

Ada dua macam teori voting behaviour yang dapat dikelompokkan dalam dua mashab besar. Pertama, pendekatan *voting* dari mashab sosiologis yang dipelopori oleh Columbia's University Bureau of Applied Social Science. Kedua, pendekatan *voting* dari mashab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigans Survey Research Center (Gaffar, 1992:4-9).

Dalam perkembangan Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, muncul sebuah fenomena yang menarik yaitu perubahan karakteristik pemilih atau mudahnya disebut reorientasi *voting behavior*. Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini menjadi lebih kompleks dan saling berkaitan, dimana beberapa keadaan menunjukkan perubahan yang berbeda dari anggapan umum yang berkembang, mengingat jelas bahwa Jawa Timur notabene adalah pusat dari lumbung suara masyarakat Nahdliyin. Beberapa faktor-faktor tersebut penulis sajikan dalam diagram dengan prosentase yang jelas seperti dikutip dalam laporan resmi lembaga survey Poltracking periode 6-11 Maret 2018.

Gambar 2. Hasil Survey terhadap Preferensi dan Karakteristik Pemilih pada Calon Gubernur Jawa Timur



Sumber: Poltracking Indonesia

Selain data diatas, survei tersebut menemukan bahwa Peduli/ Merakyat (30.5%), Jujur Berintegritas (17.9%) Berpengalaman (10.6%) merupakan beberapa sifat/kriteria Gubernur yang di harapkan memimpin provinsi Jawa Timur lima tahun ke depan. Di sisi lain, dari 6 latar belakang kandidat yang ditanyakan, Rekam Jejak (63.0%), Agama (52.5%), Usia (36.8%) merupakan beberapa alasan publik memilih kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur.

Namun, jika kita simplifikasi ke dalam tiga kategori kelompok pemilih, maka pemilih Rasional (49.0%) sangat banyak di Jawa Timur dibandingkan pemilih Sosiologis (16.1%) dan Psikologis (17.8%). Pada dua kategori preferensi pemilih pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Elistianto Dardak unggul pada pemilih Sosiologis (48.4%) dan Psikologis (48.8%) dari pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) - Puti Guntur Soekarno, sedangkan pemilih rasional tersebar hampir berimbang. Dominasi pemilih rasional cukup memantulkan anggapan publik yang berbeda bila melihat pilgub Jawa Timur 2013, pilgub tahun ini masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar adalah masyarakat nahdliyin lebih mengedepankan rasionalitas dan mengesampingkan fanatisme mereka pada kedua tokoh Nahdliyin yang bertarung di pulgub Jatim 2018.

D. PENUTUP

Sebagai salah satu provinsi paling strategis dalam berbagai bidang baik ekonomi maupun politik, Provinsi Jawa Timur memang selalu menarik untuk dikaji setiap pelaksanaan kontestasi politik Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Menariknya, Pilgub Jatim tahun 2018 ini diikuti oleh dua pasangan calon yakni Khofifah- Emil Dardak dan Saifullah Yusuf- Puti Guntur Soekarno yang sama-sama memiliki afiliasi pada Nahdlatul Ulama yang notabene sebagai salah satu lumbung suara di Jawa Timur. Namun, dinamika politik di Jawa Timur tak hanya pada kuantitas massa Nahdliyin saja, melainkan dengan kultur yang heterogen, Jawa Timur memiliki pembagian wilayah kultural pada empat poros yakni Mataraman, Tapal Kuda, Arek dan Madura yang masing-masing memiliki karakteristik sosial, budaya hingga preferensi politik.

Berdasarkan hasil survey yang dirilis oleh Litbang Kompas pada bulan Februari dan Mei 2018, menunjukkan adanya hasil yang cukup menarik bagi loyalitas pemilih *abangan* dan santri yang tersebar di empat poros wilayah kultural tersebut. Paling menonjol, loyalitas

pemilih *abangan* di wilayah Mataraman yang secara karakteristik ideologis mereka cukup dekat dengan Partai PDI-Perjuangan justru bergeser pada Khofifah- Emil Dardak dibanding dengan Saifullah Yusuf- Puti Guntur Soekarno yang jelas jelas memiliki trah Soekarno serta diusung oleh PDI- Perjuangan. Sedangkan, loyalitas pemilih santri yang dominan di wilayah Tapal Kuda/ Pandalungan dan Madura mengerucut pada pasangan Khofifah- Emil Dardak, meski pada survey bulan Februari di wilayah Tapal Kuda/ Pandalungan sempat dikuasai oleh Saifullah Yusuf- Puti Guntur Soekarno.

Kondisi tersebut nampaknya memunculkan sebuah fenomena yang dapat dikatakan dengan reorientasi *voting behaviour* pada pemilih, dimana ternyata pemilih rasional cukup dominan pada pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Dominasi pemilih rasional cukup membiaskan anggapan publik yang berbeda bila melihat pilgub Jawa Timur 2013, pilgub tahun ini masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar adalah masyarakat Nahdliyin lebih mengedepankan rasionalitas dan mengesampingkan fanatisme mereka pada kedua tokoh Nahdliyin yang bertarung di pulgub Jatim 2018. Begitupula yang terjadi pada masyarakat *abangan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Nathan. 2012. *Clientelism and the Personal Vote in Indonesia*. Ottawa: CPSA.
- Aspinall, Edward, Marcus Mietzner, Institute of Southeast Asian Studies, and Conference on the Theme Democracy in Practice. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Buehler, Michael. 2010. "Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of The Public Sphere." *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, 267-85.
- Buehler, Michael (2009) 'The Rising Importance of Personal Networks in Indonesian Local Politics: An Analysis of the District Government Head Elections in South Sulawesi in 2005.' In: *Deepening Democracy in Indonesia*. Singapore: ISEAS, pp. 101-124.
- Buehler, Michael and Tan, Paige (2007) 'Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province.' *Indonesia*, 84 . pp. 41-69
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. Glencoe, Ill: The Free Press.
- Haris, Syamsudin. 2007. *Pemilu Langsung di tengah Oligarki Partai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Polgov).
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Mietzner, Marcus. 2010. "Indonesia in 2009: Electoral Contestation and Economic Resilience." *Asian Survey* 50 (1): 185-94. <https://doi.org/10.1525/as.2010.50.1.185>.
- Meitzner, Marcus. 2009. "Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System." *Analysis* May 2009: 1-24.
- Plano, Jack C., 1971. Rober E Ranney. *Political and Voters*,

Third Edition

- Rasyid, Ryaas. 2003. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Querubin, Pablo. 2010. *Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines*. Cambridge: Harvard & MIT Academy.
- Rasyid, Abdul, and A. Ambo Sakka. 2003. *Ekspansi dan Kontraksi Ekspor Kopra Makassar 1883-1958*. Jakarta: Jurusan Sejarah Universitas Indonesia.
- Sidel, John T. 2004. "Bosisme dan demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia: menuju kerangka analisis baru tentang 'orang kuat lokal.'" *Politisasi demokrasi : politik lokal baru*, 71-104.
- Zuhro, R. Siti. 2009. *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

